

PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AUDIT REPORT LAG

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2012- 2014)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

MUHAMMAD FAISHAL
NIM. 12030111140267

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Muhammad Faishal
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140267
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AUDIT REPORT LAG (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014)**

Dosen Pembimbing : Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, Macc, Akt.

Semarang, 24 Juni 2015

Dosen Pembimbing

(Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, Macc, Akt.)

NIP. 19610109 198803 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Muhammad Faishal

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140267

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME GOOD
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
AUDIT REPORT LAG (Studi empiris pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 3 Juli 2015

Tim Penguji

1. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt. (.....)
2. Indira Januarti, Dr., S.E., M.Si., Akt (.....)
3. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Muhammad Faishal, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Audit Report Lag (Studi empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis lainnya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 20 Juni 2015

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Faishal

NIM: 12030111140267

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the internal factors that affect audit report lag of financial reports to the manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The examined factors of this research are board size, board independence, audit committee, and audit committee meetings as the independent variable, while the audit report lag as the dependent variable.

The sample consists of 292 companies listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2012-2014. The data that was used in this research was secondary data and selected by using purposive sampling method. This study used purposive sampling method and multiple linear regression as the analysis method. Before being conducted by regression test, it was examined by using the classical assumption tests.

The results of this study indicate that the committee audit size did not have significant influence to the audit report lag. Board size, independence board and audit committee meetings have significant influence to audit report lag.

Keywords: Audit report lag, board size, board independence proportion, committee audit size, committee audit meetings, auditor reputation, and company size.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal yang berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan jumlah rapat komite audit sebagai variabel independen sedangkan *audit report lag* sebagai variabel dependen.

Sampel penelitian ini terdiri dari 292 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Model analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen dan jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Kata Kunci: *Audit report lag*, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (QS. Al-Insyirah ayat 5-8)

“Where there is no struggle, there is no strength”

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Allah SWT,
Papa, Mama, dan Adik adik tercinta,
Sahabat dan teman-teman.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Audit Report Lag” dengan lancar dan tepat waktu, guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh derajat Strata 1 (S1) Program Sarjana pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, Msi., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt. selaku dosen pembimbing atas motivasi, perhatian, bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
4. Alm. DR. H. Sugeng Pamudji, M.Si., Akt. Dan Aditya Septiani S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir studi.
5. Para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis

menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

6. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis selama proses studi.
7. Mama, Papa, Rizky, Luthfi dan sanak keluarga lain yang selalu memberi perhatian, memberi semangat, dan memberi masukan kepada penulis, terimakasih atas doa yang terus menerus diberi dari awal hingga akhir penulisan skripsi.
8. Nadya Natasha yang selalu memberi dukungan tanpa henti, memberi semangat dengan caranya yang luar biasa, memberi dorongan terus menerus hingga proses penulisan skripsi menjadi lebih ringan, terimakasih atas doa yang terus menerus diberi dari awal hingga akhir penulisan skripsi.
9. Gybg sahabat sejak semester 1 Fika, Ligya, Yeni, Farhan dan Kelik. Terimakasih atas dukungan dan semangat untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta kebersamaan yang tak terlupakan selama perkuliahan
10. Sahabat yang sudah seperti keluarga selama tinggal di Semarang Rheza, Yosua, Bayu, Bram, Milzam, Satria, Melvin, Akram, Randy, Jamet, Dika, Kosyi, Sheila, Yaya, Firda, Fani, Shinta, Gita, Fay, Belgis terimakasih atas dukungan dan semangat untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta kebersamaan yang tak terlupakan selama perkuliahan.
11. Banjarsari 51 Kukuh, Fajar, Taufik, Ijal, Raffi, Farhan, Dono, Fuad dan Revan yang selalu menemani dan memberi dukungan terhadap penulis, memberi hiburan disaat penulis patah semangat, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.

12. Nomad Runners Maul, Ricky, Alvin, Hiko, Kevin, Widhi, David, Fareza, Adib, Bastian, Binsar, Husni, Lita, Fira, Sani, dll. Terimakasih untuk segala bentuk dukungannya, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
13. Abang abang Sophomore Dece, Bira, Aldo, Pomo, Bowo, Mandor, Yohan, Rino, Ojay, Balqi, dll. Terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
14. KKN Tim 1 2015 Desa Pladen Kec Jekulo, Kudus. Terimakasih untuk segala bentuk dukungannya, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
15. Teman-teman akuntansi angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya.
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini. Jika ada kata lebih dari terimakasih itu yang akan penulis ucapkan untuk kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai masukan bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Juni 2015

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2. Manfaat Penelitian	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori.....	13

2.1.1. Teori Agensi	13
2.1.2. Audit Report Lag.....	15
2.1.3. Corporate Governance.....	16
2.1.4. Ukuran Dewan Komisaris	19
2.1.5. Dewan Komisaris Independen.....	20
2.1.6. Ukuran Komite Audit.....	22
2.1.7. Rapat Komite Audit	25
2.2. Penelitian Terdahulu	26
2.3. Kerangka Pemikiran.....	30
2.4. Perumusan Hipotesis	31
2.4.1. Ukuran Dewan Komisaris dan Audit Report Lag	31
2.4.2. Dewan Komisaris Independen dan Audit Report Lag	31
2.4.3. Ukuran Komite Audit dan Audit Report Lag.....	32
2.4.4. Rapat Komite Audit dan Audit Report Lag	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	35
3.1.1. Variabel Dependen.....	35
3.1.2. Variabel Independen	36
3.1.2.1. Ukuran Dewan Komisaris	36
3.1.2.2. Dewan Komisaris Independen.....	36
3.1.2.3. Ukuran Komite Audit	37
3.1.2.4. Rapat Komite Audit.....	37
3.1.3. Variabel Kontrol	37

4.2.2.1. Uji Normalitas.....	54
4.2.2.2. Uji Multikolonieritas.....	58
4.2.2.3. Uji Autokorelasi.....	59
4.2.2.4. Uji Heteroskedastisitas.....	60
4.2.3. Analisis Regresi Berganda	61
4.2.4.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)....	62
4.2.4.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	62
4.2.4.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	63
4.3. Interpretasi Hasil	67
BAB V PENUTUP.....	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Keterbatasan Penelitian	73
5.3. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	48
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4.3 Cross Tab.....	50
Tabel 4.4 Reputasi Auditor	54
Tabel 4.5 Hasil Kolmogorov-Smirnov 1.....	56
Tabel 4.6 Hasil Kolmogorov-Smirnov 2.....	57
Tabel 4.7 Hasil Multikolonieritas	59
Tabel 4.8 Hasil Autokorelasi.....	60
Tabel 4.9 Hasil Glejser.....	60
Tabel 4.10 Hasil Uji F Model Regresi	62
Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	62
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Berganda.....	64
Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis.....	67

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4.1 Pengujian Sebaran Variabel	55
Gambar 4.2 Pengujian Normalitas	58
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
LAMPIRAN A Daftar Sampel Perusahaan	78
LAMPIRAN B Hasil Analisis Data	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan berisi informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya. Seperti yang dijelaskan oleh PSAK No. 1 Tahun 2013 pengertian laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, sedangkan tujuan pembuatan laporan keuangan yaitu, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Maka dari itu laporan keuangan yang baik harus memenuhi syarat-syarat antara lain relevan, jelas, dan dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan.

Laporan keuangan memiliki sebuah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam pelaporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran-ukuran normatif tersebut dalam laporan keuangan sering disebut dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Kieso et al. (2011) karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut terdiri dari:

- a) Laporan keuangan harus relevan, artinya laporan keuangan harus menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan penggunanya.

- b) Laporan keuangan harus dapat dimengerti oleh para pemakainya. Oleh karena itu laporan keuangan harus dinyatakan dalam bentuk istilah-istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian pemakainya.
- c) Laporan keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh penguji yang independen dan objektif dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
- d) Laporan keuangan harus netral, dalam arti tidak disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak tertentu, melainkan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum pemakai informasi.
- e) Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu, sehingga pengambilan keputusan dapat ditetapkan sedini mungkin.
- f) Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut pada periode sebelumnya.
- g) Laporan keuangan harus lengkap, dalam arti menyajikan informasi keuangan yang memadai sesuai dengan yang diperlukan oleh pemakainya.

Terdapat beberapa kendala untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang relevan, salah satunya adalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan. Informasi tidak dapat dikatakan relevan jika tidak tepat waktu, informasi harus tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan

harus dipenuhi oleh perusahaan khususnya perusahaan publik yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat umum dan diperdagangkan di bursa.

Untuk melindungi kepentingan para pemegang saham di pasar modal, Bapepam mengeluarkan aturan mengenai batas waktu pelaporan keuangan perusahaan, yaitu Peraturan Bapepam No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Bapepam mewajibkan setiap perusahaan go public yang terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor independen kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Menurut para ahli dan beberapa penelitian terdahulu, semakin cepat informasi laporan keuangan dipublikasikan ke publik, maka informasi tersebut semakin bermanfaat bagi pengambilan keputusan, dan sebaliknya jika terdapat penundaan yang tidak semestinya, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya dalam hal pengambilan suatu keputusan. Menurut Kartika (2009), semakin singkat jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan tanggal penyampaian laporan keuangan, maka akan semakin banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan tersebut. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan apabila laporan tersebut disajikan secara tepat waktu dan akurat. Abdulla (1996) berpendapat bahwa semakin pendek waktu menunggu antara akhir tahun dan tanggal publikasi, maka semakin besar manfaat yang dapat diperoleh dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dari para peneliti sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin cepat perusahaan

mengeluarkan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan maka semakin besar manfaat dari laporan keuangan tersebut.

Salah satu kendala dalam menghasilkan kualitas informasi yang relevan yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan. Faktor penting yang mempengaruhi ketepatan waktu rilis informasi ini adalah ketepatan waktu audit tahunan yang dilakukan auditor (Afify, 2009). Auditing merupakan aktivitas yang membutuhkan waktu sehingga kadang-kadang pengumuman laba dan publikasi laporan keuangan menjadi tertunda. Auditor melakukan tugas auditnya berdasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), khususnya pada bagian standar pekerjaan lapangan, tentang prosedur perlunya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pengumpulan bukti-bukti yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat. Pemenuhan standar audit oleh auditor dapat berdampak terhadap lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak terhadap kualitas laporan auditnya.

Menurut Subekti dan Widiyanti lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dapat dilihat dari perbedaan tanggal pada laporan keuangan dengan tanggal laporan opini audit. Perbedaan waktu tersebut disebut *audit report lag*. Semakin lama auditor mengeluarkan laporan keuangan dengan opini audit maka semakin lama *audit report lag*-nya. *Audit report lag* menurut Knechel dan Payne (2001) dibagi menjadi 3 komponen yaitu *scheduling lag*, *fieldwork lag*, dan *reporting lag*. *Scheduling lag* merupakan selisih waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan atau tanggal neraca dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor.

Hal ini berarti bahwa manajemen dapat menjadi salah satu penyebab *audit report lag*.

Menurut Naimi (2010), panjang-pendeknya waktu pelaporan keuangan mempengaruhi pengambilan keputusan investor, karena dengan adanya penundaan informasi kepada investor dapat mempengaruhi kepercayaan investor di pasar modal. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat mengembalikan kepercayaan investor tersebut dengan cara mengurangi *audit report lag* dari laporan keuangan.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi panjang-pendeknya waktu penyampaian laporan keuangan audit, salah satunya dengan adanya *good corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI) pengertian *good corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) *good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha

sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Perusahaan sebagai pelaku usaha harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berdasarkan teori dan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap auditor sehingga dapat mengurangi *audit report lag*.

Penelitian ini ditujukan untuk meneliti pengaruh komponen-komponen internal perusahaan sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat mengurangi *audit report lag*. Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap *audit report lag*, seperti penelitian yang dilakukan Afify (2009) pada perusahaan di Mesir tahun 2007, yang menemukan bahwa komponen *corporate governance* seperti *board independence*, *duality of CEO*, dan *existence of an audit committee* mempengaruhi *audit report lag* secara signifikan, sedangkan *ownership concentration* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian Naimi (2010) pada perusahaan yang berada di Malaysia tahun 2002 menemukan bahwa *audit committee size*, *audit committee meeting* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan *audit committee independence* dan *audit committee financial expertise* tidak berpengaruh signifikan. *Board independence* memiliki hubungan positif yang lemah terhadap

audit report lag, *board size* yang besar memperburuk *audit report lag*, dan *CEO duality* mengurangi *audit report lag* walaupun tidak signifikan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa beberapa komponen *corporate governance* dapat mempengaruhi *audit report lag*, namun banyak juga yang ternyata tidak mempengaruhi *audit report lag* dari laporan keuangan suatu perusahaan secara signifikan. Dengan masih adanya gap tersebut peneliti ingin melakukan penelitian serupa di Indonesia. Penelitian ini mengacu pada penelitian Afify (2009) yang meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap *audit report lag* di Mesir pada tahun 2007. Namun demikian, terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Afify (2009) menggunakan variabel independen Konsentrasi Kepemilikan, Komisaris Independen, CEO Duality, dan Adanya Komite Audit, sedangkan dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, dan Rapat Komite Audit. Alasan peneliti tidak menggunakan variabel CEO Duality adalah karena Indonesia menggunakan two tier system dimana pengawasan perusahaan dilakukan oleh Board of Commissioner dan pengurusan perusahaan dilakukan oleh Directors. Pada sistem two tier dalam susunan dewan terdapat Dewan Direksi (Board of Director) dan Dewan Komisaris (Board of Commissioner). Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam kerangka tata kelola perusahaan, sebab Dewan Direksi sebagai pihak eksekutif bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan, sementara Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi kinerja Dewan Direksi dan kebijakan yang dibuatnya. Selain itu peneliti juga berbeda

dalam sampel penelitian, Afify menggunakan perusahaan di Mesir sedangkan peneliti menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan rapat komite audit dapat berpengaruh terhadap *audit report lag*.

1.2 Rumusan Masalah

Laporan keuangan seharusnya memenuhi empat karakteristik kualitatif agar berguna bagi pemakai yaitu relevan, dapat dipahami, andal, dan dapat diperbandingkan. Untuk memenuhi salah satu karakteristik kualitatif yaitu relevan, maka laporan keuangan suatu perusahaan haruslah disajikan dengan tepat waktu. Namun demikian, dalam SPAP terdapat standar yang mengatur mengenai prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan. Prosedur ini mengatur hal-hal seperti perlunya perencanaan atas aktivitas audit yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Oleh sebab itu auditor membutuhkan waktu yang tidak singkat agar laporan keuangan yang disajikan akurat, relevan, serta dapat diandalkan.

Menurut peraturan Bapepam No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Bapepam mewajibkan setiap perusahaan go public

yang terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor independen kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Tentunya dalam penyajian laporan keuangan tersebut banyak perusahaan yang terkadang mendapat kendala dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan audit tersebut, namun dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik diyakini dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat meminimalisir *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap *audit report lag*, sehingga dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
4. Apakah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara mekanisme *Corporate Governance* yaitu, Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Jumlah Anggota Komite Audit, dan Jumlah Pertemuan Komite Audit, terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan terutama auditor dan perusahaan itu sendiri. Secara terperinci manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pengaruh mekanisme *Corporate Governance* yang dapat berpengaruh terhadap *audit report lag*.
2. Bagi akademisi, penelitian ini memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan peran *Corporate Governance* terhadap *audit report lag*.
3. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat sebagai masukan sekaligus acuan dalam mencermati pelaksanaan penyusunan laporan keuangan perusahaan yang berkualitas sehingga dapat mengurangi *audit report lag*.
4. Bagi penelitian mendatang, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang mengenai peran mekanisme *Corporate Governance* dan *audit report lag* pelaporan keuangan perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar acuan dilakukannya penelitian ini dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis. Pada bab ini dijelaskan pula kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil statistik, serta dijelaskan pula argumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *good corporate governance*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi menjelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*), mereka juga menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. *Principal* adalah pemegang saham atau investor dan yang dimaksud *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen.

Menurut Eisenhardt (1989) teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak oportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Sehingga akan menimbulkan adanya konflik keagenan yang dapat menyesatkan *stakeholder* tentang nilai pasar dan kondisi keuangan perusahaan, hal ini dapat menyebabkan *stakeholder* melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Konflik kepentingan dapat semakin meningkat terutama karena *principal* tidak dapat memonitor aktivitas *agent* sehari-hari untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan *principal*. *Principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent*, sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* Nasution dan Doddy (2007), kemudian ketidakseimbangan informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat menyebabkan agen berperilaku yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik. Perilaku yang dimaksud adalah *adverse selection dan moral hazard* Scott (2000).

Adverse selection terjadi ketika para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar, dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham, sedangkan *moral hazard* adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Seperti yang telah dijelaskan, pemisahan kepentingan antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) memungkinkan munculnya konflik yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan. Menurut Boediono (2005), dalam kondisi seperti ini diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Senada dengan pernyataan Boediono (2005), Ujiyantho dan Pramuka (2007) mengatakan bahwa *corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme *corporate governance* memiliki kemampuan dalam kaitannya menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

2.1.2 Audit Report Lag

Audit Report Lag adalah rentang waktu penyelesaian audit dari tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan audit (Afify, 2009). Perbedaan waktu antara tanggal tutup buku perusahaan dengan tanggal laporan auditor independen mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor, oleh karena itu semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya maka semakin panjang *audit delay* nya.

Menurut Dyer dan Mchugh (1975) ada tiga kriteria keterlambatan dalam penelitiannya:

1. Auditor's report lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
2. Preliminary lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa.
3. Total lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di bursa.

Menurut Abdulla (1996) dalam Hariani (2014), semakin panjang waktu yang dibutuhkan di dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu perusahaan milik klien, maka semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor kepada investor tertentu atau bahkan bisa menyebabkan bias yang menyebabkan rumor-rumor lain di bursa saham. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Naimi (2010), menurutnya panjang-pendeknya audit report lag yang terjadi mempengaruhi pengambilan keputusan investor, karena dengan adanya penundaan informasi kepada investor dapat mempengaruhi kepercayaan investor di pasar modal. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulator untuk menentukan suatu regulasi yang dapat mengatur batas waktu penerbitan laporan keuangan yang harus dipenuhi pihak emiten.

2.1.3 Corporate Governance

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan

eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Sedangkan tujuan dari *corporate governance* menurut FCGI adalah:

1. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam rangka memperkuat posisi perusahaan kompetitif baik domestik maupun internasional, dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat untuk mendukung investasi.
2. Untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan, dan efisien, serta mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi, dan RUPS.
3. Untuk mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan direksi untuk membuat keputusan dan untuk bertindak dengan rasa moralitas yang ketat, sesuai dengan peraturan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum, dan sesuai dengan tanggung jawab sosial mereka terhadap berbagai stakeholder dan perlindungan lingkungan.

Sedangkan prinsip-prinsip good corporate governance menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) terdiri dari:

1. Transparansi

Yaitu mengelola perusahaan secara transparan dengan semua stakeholder (orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan). Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam

membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. Accountability

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat job description yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.

3. Responsibility

Yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Di sini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.

4. Independensi

Yaitu berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan-pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus berjalan dengan

menguntungkan supaya bisa memelihara keberlangsungan bisnisnya, namun demikian bukan keuntungan yang tanpa melihat orang lain yang juga harus untung. Semuanya harus untung dan tidak ada satu pun yang dirugikan.

5. Fairness

Yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stake holder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang fair tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis kita.

2.1.4 Ukuran Dewan Komisaris

Berdasarkan UU No. 40 Th. 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari anggota Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian dewan komisaris. Pengangkatan dewan komisaris diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan dewan komisaris.

Dewan Komisaris memiliki fungsi melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Oleh karena itu, semakin besar jumlah dewan komisaris maka pengawasan yang dilakukan akan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang kemudian akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat mengurangi *audit report lag*.

2.1.5 Dewan Komisaris Independen

Pengertian komisaris independen menurut Bapepam adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Afifi (2009) salah satu peran utama komisaris independen adalah sebagai fungsi kontrol. Secara langsung keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya. Berdasarkan pedoman *good corporate governance*, komposisi atau jumlah komisaris independen tidak ditentukan dalam jumlah tertentu namun demikian jumlah atau komposisi komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang

akuntansi atau keuangan. Menurut peraturan Bapepam No. IX.I.5 komisaris independen adalah anggota komisaris yang:

- a) Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
- b) Bukan merupakan orang yang bekerja pada emiten dan perusahaan publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- c) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
- d) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik;
- e) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik; dan
- f) Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Menurut Duchin et al. (2010) dalam Naimi et al (2010) karena ketidakberpihakannya, dewan komisaris independen diyakini dapat melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Cohen et al (2002) dalam Afify (2009) berpendapat bahwa dalam kasus di mana struktur *corporate governance* (komisaris independen) sudah menerapkan monitoring yang efektif serta perspektif strategis yang kuat, ada potensi untuk meningkatkan keefisienan dan keefektifan dalam audit. Bukti Empiris di Amerika Serikat, Inggris Yunani, Italia,

Cina, Hong Kong, Korea, dan Singapura umumnya mendukung peran pengawasan positif dewan independen. Studi menunjukkan bahwa pencantuman direktur independen atau diluar dewan direksi meningkatkan kualitas pengungkapan (Naimi, 2010). Berdasarkan hasil penelitian Afify (2009) peran monitoring yang dilakukan oleh komisaris independen memiliki dampak positif terhadap kualitas pengungkapan keuangan dan mengurangi *audit report lag*.

2.1.6 Ukuran Komite Audit

Menurut peraturan Bapepam No. IX.I.5 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Pengaturan mengenai jumlah komite audit bagi emiten dan perusahaan publik juga diatur dalam peraturan Bapepam No. IX.I.5, dalam peraturan tersebut emiten dan perusahaan publik diwajibkan membentuk komite audit yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dimana salah satunya merupakan komisaris independen perusahaan dan bertindak sebagai ketua komite audit.

Tugas dan tanggung jawab komite audit menurut peraturan Bapepam No. IX.I.5 yaitu:

- a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;

- b) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- c) Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham;
- d) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;
- e) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi;
- f) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko emiten dan perusahaan publik;
- g) Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
- h) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Adapun persyaratan anggota komite audit menurut peraturan Bapepam No.

IX.I.5 adalah:

- a) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya.
- b) Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.
- c) Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.

- d) Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
- e) Salah satu anggota memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- f) Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, konsultan hukum mapupun pihak lain yang memberikan jasa audit, non audit maupun jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat.
- g) Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan direksi, komisaris dan pemegang saham utama emiten maupun perusahaan publik.
- h) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung mapun tidak langsung dengan kegiatan usaha emiten maupun perusahaan publik.
- i) Tidak memiliki saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung.
- j) Bukan merupakan orang yang berwenang dan bertanggung jawab merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan emiten maupun perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat.

Menurut Naimi (2010) masalah dalam proses pelaporan keuangan lebih mungkin ditemukan dan diselesaikan apabila terdapat komite audit yang lebih besar. Afify (2009) juga mendapatkan hasil bahwa komite audit memainkan peran penting dalam memperkuat komunikasi antara penilaian manajemen dan auditor

eksternal, mempengaruhi penilaian auditor dari risiko kontrol dan risiko audit, jam audit yang direncanakan dan tingkat pengujian substantif, dan membuat laporan keuangan yang baik, sehingga akan mengurangi *audit report lag*.

2.1.7 Rapat Komite Audit

Pertemuan komite audit adalah tempat direksi untuk membahas proses pelaporan keuangan dan proses monitoring pelaporan keuangan, pertemuan komite audit dilakukan secara periodik yang ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari

kerja. Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada dewan komisaris utama adalah:

1. Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan.
2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit.
3. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Berdasarkan penelitian Raghunandan et al. (1998) dan Abbott et al. (2003) dalam Naimi (2010) dengan seringnya melakukan pertemuan, komite audit akan membuat pembaharuan dalam informasi dan pengetahuan tentang isu-isu akuntansi atau audit dan dapat segera mengarahkan sumber daya internal dan eksternal untuk mengatasi masalah ini secara tepat waktu. Dengan demikian, dengan adanya frekuensi pertemuan komite Audit yang tinggi diharapkan dapat mengurangi *audit report lag*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh karakteristik *good corporate governance* terhadap *audit report lag*, namun hasil penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda, sehingga masih terdapat research gap yang akan kemudian akan diteliti oleh penulis. Abdelsalam dan Donna (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* dan ketepatan waktu pelaporan keuangan terhadap *corporate internet reporting*. Penelitian ini menggunakan *board independence, role duality, board experience, dan ownership*

structure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *board independence* dan *ownership structure* berpengaruh negatif terhadap *corporate internet reporting*.

Afify (2009) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *audit report lag* di Mesir. Penelitian ini menggunakan variabel dependen *audit report lag* dan variabel independen *Ownership concentration*, *board independence*, *duality of CEO*, dan *existence of an audit committee*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *board independence*, *duality of CEO*, dan *existence of audit committee* secara signifikan mempengaruhi *audit report lag*.

Naimi et al. (2010), meneliti tentang hubungan dari *corporate governance* terhadap *audit report lag* pada perusahaan go public di Malaysia pada tahun 2002, penelitian ini menggunakan variabel dependen *audit report lag* dan variabel Independen *audit committee size*, *audit committee independence*, *audit committee meeting*, *audit committee financial expertise*, *board size*, *board independence*, *CEO duality*. Hasilnya *audit committee size* dan *audit committee meeting* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan *audit committee independence* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Ika dan Ghazali (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh keefektifan komite audit terhadap financial reporting lead time di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel dependen ketepatan waktu pelaporan dan variabel independen keefektifan komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan komite audit berpengaruh negatif terhadap financial reporting lead time yang merupakan proksi dari ketepatan waktu pelaporan.

Putri dan Raharja (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *audit report lag* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel dependen *audit report lag* dan variabel independen jumlah komite audit, independensi komite audit, rapat komite audit, kompetensi komite audit, dewan komisaris, dan komisaris independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi komite audit, kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Ringkasan penelitian-penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Abdelsalam dan Donna (2007)	Corporate Governance and Timeliness of Corporate Internet Reporting	Dependen : Corporate Internet Reporting Independen : Board Independence, Chair Dual Role, Board Experience, dan Ownership Structure	Hasil penelitian menemukan bahwa Board Independence dan Ownership Structure berpengaruh negatif terhadap CIR
2.	H.A.E Afify (2009)	Does implementing corporate governance have any impact? Empirical evidence from Egypt	Dependen : Audit Report Lag Independen : Ownership Concentration, Board Independence, Duality of CEO, Existence of an Audit Committee	Hasil penelitian menemukan bahwa Board Independence, Duality of CEO, dan Existence of an Audit Committee mempengaruhi Audit Report Lag secara signifikan, sedangkan Ownership Concentration tidak berpengaruh terhadap Audit report Lag.
3.	Naimi (2010)	Corporate Governance and Audit	Dependen: Audit Report Lag Independen :	Hasil penelitian menemukan bahwa Audit Committee Size, Audit

	Report Lag in Malaysia	Audit Committee Size, Audit Committee Independence, Audit Committee Meeting, Audit Committee Financial Expertise, Board Size, Board Independence, CEO Duality.	Committe Meeting berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag, sedangkan Audit Committee Independence dan Audit Committee Financial Expertise tidak berpengaruh signifikan. Board Independence memiliki hubungan positif yang lemah terhadap Audit Report Lag, Board Size yang besar memperburuk Audit Report Lag, dan CEO Duality mengurangi Audit Report Lag walaupun tidak signifikan.	
4.	Ika dan Ghazali (2011)	Audit Committee Effectiveness and Timeliness of Reporting	Dependen : Financial Reporting Lead Time Independen : Keefektifan Komite Audit	Hasil penelitian menemukan bahwa Keefektifan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Financial Reporting Lead Time.
5.	Putri dan Raharja (2013)	Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap Audit Report Lag	Dependen : Audit Report Lag Independen : Jumlah Komite Audit, Independensi Komite Audit, Rapat Komite Audit, Kompetensi Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Komisaris Independen	Hasil penelitian menemukan bahwa Independensi Komite Audit, Kompetensi Komite Audit berpengaruh negatif terhadap ARL, sedangkan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap ARL.

Sumber : Dari berbagai jurnal

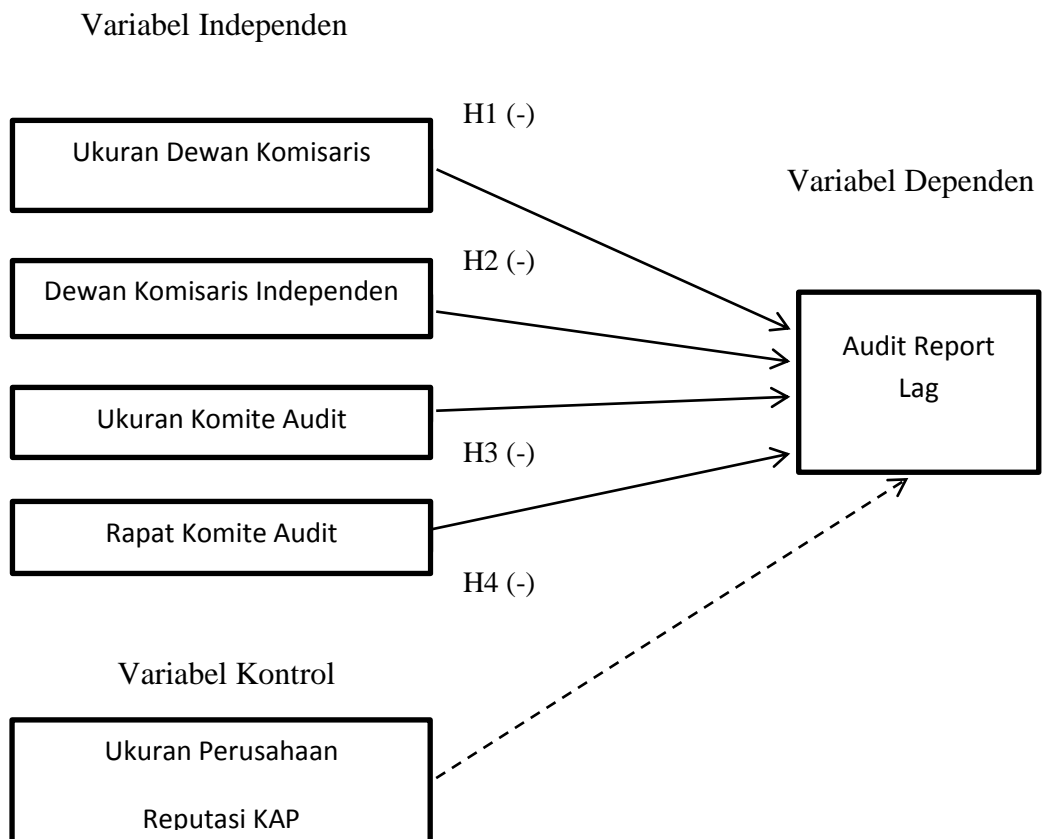
Penelitian ini mengacu pada penelitian Afify (2009). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, dalam penelitian ini peneliti menambahkan ukuran dewan komisaris dan rapat komite audit sebagai variabel independen. Selain itu, penelitian ini juga berbeda dalam hal periode pengambilan

data sampel penelitian. Peneliti menggunakan data terbaru dari perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi *audit report lag*. Faktor-faktor tersebut antara lain ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran komite audit, rapat komite audit, kerangka pemikiran dijelaskan pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Audit Report Lag*

Ukuran dewan komisaris merupakan salah satu komponen dari *corporate governance* yang dapat mempengaruhi *audit report lag* perusahaan. Dewan Komisaris memiliki fungsi melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Oleh karena itu, semakin besar jumlah dewan komisaris maka pengawasan yang dilakukan akan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang kemudian akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat mengurangi *audit report lag*.

. Berdasarkan konsep yang dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

2.4.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Audit Report Lag*

Dewan komisaris independen merupakan salah satu komponen dari *corporate governance* yang dapat mempengaruhi *audit report lag* perusahaan. Menurut Naimi (2010) Direktur non-eksekutif yang Independen dengan ketrampilan yang tepat, tidak memiliki hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan penilaian Independen atau kemampuan bertindak dalam kepentingan terbaik pemegang saham dipandang lebih baik dalam memonitor manajemen dibandingkan apabila direktur tersebut dari dalam

perusahaan. Fama dan Jensen (1983) memberikan hasil penelitian bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka akan tercipta monitoring yang lebih efektif pada manajerial. Penelitian yang dilakukan Afify (2009) juga mendapatkan hasil bahwa dewan komisaris independen secara signifikan mempengaruhi *Audit Report Lag*. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* perusahaan.

2.4.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag* Perusahaan

Ukuran komite audit merupakan salah satu komponen dari *corporate governance* yang dapat mempengaruhi *audit report lag* perusahaan. Menurut peraturan Bapepam No. IX.I.5 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Pengaturan mengenai jumlah komite audit bagi emiten dan perusahaan publik juga diatur dalam peraturan Bapepam No. IX.I.5, dalam peraturan tersebut emiten dan perusahaan publik diwajibkan membentuk komite audit yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang.

Menurut Karamanou dan Vafeas (2005) dalam Afify (2009) Komite audit diharapkan dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan konflik dengan

manajemen dan menyebabkan beberapa perbaikan dalam kualitas audit secara keseluruhan. Komite audit sekarang sedang dilihat sebagai pemain utama dalam upaya untuk melaksanakan reformasi pemerintahan dan membangun kembali kepercayaan publik dalam pelaporan keuangan. Sebagai hasil dari langkah-langkah dan tanggung jawab baru, akan ada juga perubahan hubungan antara manajemen, komite audit, dan auditor eksternal. Menurut Lambe (2005), tiga prioritas untuk komite audit yaitu:

1. Pengawasan yang efektif dari manajemen dan pelaporan keuangan ;
2. Memperkuat komunikasi antara manajemen dan auditor eksternal (dan monitoring yang efektif dari auditor eksternal) ; dan
3. Independensi auditor dan Pengetahuan auditor

Menurut Naimi (2010), semakin besar ukuran komite audit maka akan semakin meningkatkan kualitas pengawasan dan masalah dalam proses pelaporan keuangan lebih mungkin ditemukan dan diselesaikan apabila terdapat komite audit yang lebih besar. Hasil penelitian Afify (2009) menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* perusahaan

2.4.4 Pengaruh Rapat Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag* Perusahaan

Menurut Peraturan Bapepam No. IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite audit melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Menurut FCGI (2002) dalam Putri (2013) komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya. Berdasarkan penelitian Raghunandan et al. (1998) dan Abbott et al. (2003) dalam Naimi (2010) dengan seringnya melakukan pertemuan, komite audit akan membuat pembaharuan dalam informasi dan pengetahuan tentang isu-isu akuntansi atau audit dan dapat segera mengarahkan sumber daya internal dan eksternal untuk mengatasi masalah ini secara tepat waktu. Nor et al. (2010) dalam Taruna dan Rahardja (2012) menyatakan bahwa pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Rapat Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* perusahaan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel terikat (*dependent*), variabel bebas (*independent*), dan variabel kontrol (*control*). Variabel terikat merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *audit report lag* yang diukur dengan jumlah hari antara tanggal penutupan tahun buku sampai dengan diterbitkannya laporan audit. Variabel bebas merupakan variabel yang diduga mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan rapat komite audit. Variabel kontrol merupakan variabel yang digunakan untuk mengontrol hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan reputasi KAP.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah *audit report lag*. *Audit report lag* merupakan perbedaan waktu antara tanggal penutupan tahun buku sampai dengan diterbitkannya laporan audit. Variabel *audit report lag* dilambangkan dengan ARL. Variabel *audit report*

lag diukur secara kuantitatif jumlah hari antara akhir tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan rapat komite audit.

3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki fungsi melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Oleh karena itu, semakin besar jumlah dewan komisaris maka pengawasan yang dilakukan akan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang kemudian akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat mengurangi *audit report lag*. Variabel ukuran dewan komisaris dilambangkan dengan BSIZE. Variabel ini diukur dengan cara menghitung jumlah dewan komisaris yang terdapat pada suatu perusahaan.

3.1.2.2 Dewan Komisaris Independen

Menurut Naimi et al. (2010) dewan komisaris independen dengan keterampilan yang tepat yang tidak memiliki bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan penilaian independen atau kemampuan untuk bertindak dalam kepentingan terbaik pemegang saham dipandang berada dalam posisi yang lebih baik untuk memonitor manajemen daripada dewan direksi.

Variabel dewan komisaris independen dilambangkan dengan BIND. Variabel ini diukur dengan cara menghitung proporsi jumlah dewan komisaris independen dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris.

3.1.2.3 Ukuran Komite Audit

Menurut peraturan Bapepam nomor IX.I.5 mengenai struktur dan keanggotaan komite audit, tertulis bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya (3) tiga orang. Variabel ukuran komite audit dilambangkan dengan ACSIZE. Variabel ini diukur dengan cara menghitung jumlah komite audit yang terdapat pada suatu perusahaan.

3.1.2.4 Rapat Komite Audit

Menurut peraturan Bapepam nomor IX.I.5 mengenai rapat komite audit, tertulis bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3(tiga) bulan. Variabel rapat komite audit dilambangkan dengan ACMEET. Variabel ini diukur dengan cara menghitung jumlah rapat yang diadakan komite audit yang terdapat pada suatu perusahaan.

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan reputasi KAP.

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Menurut Jaggi dan Tsui (1999) dalam Ika dan Ghazali (2010) perusahaan yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengatur

pengendalian internal yang tepat sehingga sedikit waktu yang dihabiskan oleh auditor eksternal dalam melakukan pengujian substantif, sehingga dapat menyelesaikan audit tepat pada waktunya. Variabel ukuran perusahaan dilambangkan dengan SIZE. Variabel ini diukur dengan logaritma natural total aset perusahaan.

3.1.3.2 Reputasi KAP

Menurut Afify (2009) perusahaan audit yang lebih besar memiliki insentif yang kuat untuk menyelesaikan audit mereka dengan lebih cepat untuk menjaga reputasi mereka. Jika tidak, mereka mungkin kehilangan pengangkatan kembali sebagai auditor perusahaan klien mereka di tahun mendatang. Variabel reputasi KAP dilambangkan dengan AUDREP. Variabel ini diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh *big 4*, dan 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh *non big 4*.

Kategori KAP *big 4* di Indonesia, yaitu:

- KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Haryanto Sahari dan rekan.
- KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama dengan KAP Sidharta-Sidharta dan Widjaja.
- KAP Ernst and Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja.
- KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP Osman Bing Satrio dan rekan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Kemudian, sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014 secara berturut-turut dan mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun 2012-2014.
2. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dan data yang lengkap pada tahun 2012-2014 terkait dengan variabel penelitian.
3. Perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya dalam rupiah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan tahunan (*annual report*) dari perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria sampel diatas. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2006). Data sekunder yang diperlukan diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan Pojok BEI UNDIP, IDX statistik 2012-2014.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang merupakan teknik pengambilan data dengan cara mencari dan mengumpulkan data berupa tanggal publikasi laporan keuangan perusahaan di situs web BEI dan sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan (annual report).

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah regresi berganda. Statistik deskriptif juga digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai data-data yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, uji asumsi klasik juga dilakukan untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi klasik dan dapat diterapkan pada model regresi. Berikut penjelasan secara rinci mengenai metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif ini meliputi jumlah sample, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (Ghozali, 2011).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis, akan dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data telah memenuhi syarat asumsi klasik dan dapat diterapkan pada model regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas (Ghozali, 2011). Berikut penjelasan secara rinci.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

a) Analisis Grafik

Pengujian normalitas melalui analisis grafik yaitu dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011).

b) Analisis Statistik

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2011).

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam regresi adalah melihat (1) nilai *tolerance* dan (2) lawannya yaitu *varian inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya

multikolonieritas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* (T) lebih dari 0,1, berarti tidak terjadi multikolonieritas. Sebaliknya jika diketahui nilai VIF lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* (T) kurang dari 0,1, berarti terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2011).

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Menurut Ghozali (2011) model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menghitung nilai Durbin Watson (DW).

Pengukuran ada tidaknya autokorelasi adalah :

- a) Apabila nilai DW lebih besar daripada batas atas, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol. Artinya, tidak ada autokorelasi positif.
- b) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol. Artinya, ada autokorelasi positif.
- c) Bila nilai DW terletak di antara batas atas dan batas bawah, maka tidak dapat disimpulkan.

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji glejser dan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residual (SRESID). Dalam uji glejser, jika nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansinya (dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 5%) maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian pada *scatterplot* jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi berganda. Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah persamaan regresinya :

$$\begin{aligned}
 \text{ARL} = & \beta_0 + \beta_1\text{BSIZE} + \beta_2\text{BIND} + \beta_3\text{ACSIZE} + \beta_4\text{ACMEET} + \beta_5\text{SIZE} + \\
 & \beta_6\text{AUDREP} + \varepsilon
 \end{aligned}
 \tag{3.1}$$

Dimana :

ARL = *Audit Report Lag*

β_0 = Konstanta

BSIZE	= Jumlah Dewan Komisaris
BIND	= Dewan Komisaris Independen
ACSIZE	= Jumlah Komite Audit
ACMEET	= Jumlah Rapat Komite Audit
SIZE	= Ukuran Perusahaan
AUDRREP	= Reputasi Auditor
ε	= Error

3.5.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai

adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

Dalam kenyataannya nilai *adjusted R²* dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted R²* negatif, maka dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$, maka *adjusted R²* = 1 sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka *adjusted R²* = $(1-k) / (k-n)$. Jika $K > 1$, maka *adjusted R²* akan bernilai negatif (Ghozali, 2011).

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

- a) Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima .
- b) Apabila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%.

3.5.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2011).

Uji statistik t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis:

- a) Jika nilai signifikansi (sig.) lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.
- b) Jika nilai signifikansi (sig.) lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima.